

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Parkir di Kota Medan sejak Februari 2022 sudah menerapkan Elektronik parking (e-parking) namun masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang menjalankan program e-parking dilapangan, dikarenakan masih banyaknya ditemukan jukir liar ataupun pihak yang mencoba mengganggu dan jumlahnya juga tak kalah banyak dari jumlah petugas e-parking dilokasi. Alhasil saat warga memarkirkan sepeda motor, seringkali ada anggapan bahwa ada uang yang diambil sehingga petugas lapangan tidak mencapai target.

Penerangan jalan adalah fasilitas umum yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya sekedar keberadaan tenaga listrik dipinggir jalan sebagai penerangan jalan. Pada Februari 2022, Bapak Hanis sudah menyeroti hal itu, PLN mensinkronkan data guna transparansi jumlah yang dipungut. Hal ini sangat disayangkan manajemen di PLN Medan sangat kurang sehat. Masalah PPJU ini mencuat kepermukaan akibat kontribusi yang diterima oleh pemerintah Kota Medan selama ini dinilai tidak sesuai yang dipungut PLN.

Karena Kota Medan adalah akses bagi wisatawan domestic dan mancanegara sedang berwisata kekawasan wisata Sumatera Utara, maka pajak penginapan dan hiburan merupakan sumber penghasilan asli daerah yang sangat prospektif di Kota Medan, bisa diperhatikan dari pajak daerah yang sangat besar kontribusinya. Pajak Hotel yang rendah disebabkan karena ada beberapa hotel tidak membayar pajak dengan benar dan tidak semua hotel melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, adanya physical distancing yang membuat penurunan terhadap hotel. Dan rendahnya pajak hiburan disebabkan karena dampak covid-19 dan peraturan PPKM yang mengharuskan tempat hiburan mengurangi jam operasional pada waktu yang ditetapkan pemerintah, sebagian tempat hiburan harus tutup karena tidak dapat menutupi biaya operasionalnya.

Karena industri jasa dan pariwisata lebih diprioritaskan dalam program pembangunan daerah, pajak kota termasuk biaya parkir, biaya penerangan jalan, biaya hotel dan biaya hiburan menjadi lebih diperhatikan. Jenis-jenis pajak diatas menggambarkan peran pajak dalam pertumbuhan suatu wilayah. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan dan cara memaksimalkan pendapatan daerah, satu-satunya dengan memperkirakan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel berikut menunjukkan jumlah penerimaan pajak parkir,

pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak hotel dan pendapatan asli daerah telah dikumpulkan Kota Medan 2018-2021:

### **Fenomena penelitian**

#### **Tujuan yang dicapai dan perwujudan pendapatan Pajak hotel, Pajak lampu Jalan, Pajak parkir, Pajak Hiburan tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis pendapatan pajak</b>	<b>Target pendapatan pajak</b>	<b>Realisasi pendapatan pajak</b>
2018	Parkir	22.000.000.000	22.209.803.703
	Penerangan Jalan	244.755.254.753	278.135.298.509
	Hotel	117.000.000.000	119.664.695.854
	Hiburan	43.000.000.000	43.079.908.039
2019	Parkir	30.000.000.000	26.567.809.962
	Penerangan Jalan	288.821.952.000	294.962.540.702
	Hotel	140.700.000.000	121.142.393.806
	Hiburan	45.300.000.000	43.768.753.146
2020	Parkir	17.184.801.000	14.119.016.934
	Penerangan Jalan	300.000.000.000	280.282.891.169
	Hotel	70.247.640.000	56.171.698.858
	Hiburan	32.530.000.000	14.468.947.982
2021	Parkir	25.312.656.964	11.787.455.178
	Penerangan jalan	269.387.955.240	231.677.649.244
	Hotel	100.951.994.839	52.649.833.491
	Hiburan	39.498.210.108	7.343.903.471

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat perbandingan antara prediksi sasaran dan perwujudan pendapatan pajak kota Medan dari 2018-2021, dimana perwujudan pendapatan kurang dari yang ditargetkan. Pada pajak parkir tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau mencapai lebih dari target sebesar Rp 209.803.703. Tetapi pada tahun 2019-2021 realisasi penerimaan pajak menurun secara terus menerus. Penurunan dapat dilihat dari tahun 2019 sebesar Rp3.432.190.038, tahun 2020 sebesar Rp3.432.190.038, dan pada tahun 2021 sebesar Rp13.525.201.786. Ini menunjukkan adanya terjadi masalah pada tahun 2019-2021 sehingga terjadi penurunan secara drastis.

Pajak penerangan jalan tahun 2018-2019 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau mencapai lebih dari target. Ini dapat dilihat dari tahun 2018 sebesar Rp33.380.043.756 dan pada tahun 2019 sebesar Rp6.140.588.702. Tetapi pada tahun 2020-2021 realisasi pendapatan pajak menyusut atau meleset dari target. Penurunan bisa dilihat dari tahun 2020 sebesar Rp19.717.108.831 dan pada tahun 2021 sebesar Rp37.710.305.996. Ini menunjukkan pada tahun 2020-2021 adanya terjadi masalah sehingga terjadi penurunan secara drastis.

Pajak hotel tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau mencapai lebih dari target sebesar Rp2.664.695.854. Tetapi pada tahun 2019-2021 realisasi pendapatan pajak menyusut atau meleset dari target. Penurunan bisa dilihat dari tahun 2019 sebesar Rp19.557.606.194, tahun 2020 sebesar Rp14.075.941.142, dan pada tahun 2021 sebesar Rp48.302.161.348. Ini menunjukkan pada tahun 2019-2021 adanya terjadi masalah sehingga terjadi penurunan secara drastis.

Pajak hiburan tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan atau mencapai lebih dari target sebesar Rp79.908.039. Tetapi pada tahun 2019-2021 realisasi pendapatan pajak menyusut atau meleset dari target. Penurunan bisa dilihat dari tahun 2019 sebesar Rp1.531.246.854, tahun 2020 sebesar Rp18.061.052.018, dan pada tahun 2021 sebesar Rp32.154.306.637. Ini menunjukkan pada tahun 2019-2021 adanya terjadi masalah sehingga terjadi penurunan secara drastis.

Peneliti tertarik untuk menggunakan topik kajian **“PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN”** Berdasarkan dari kesimpulan latar belakang yang sudah dipaparkan.

## **I.2 Tinjauan pustaka**

### **I.2.1 Dampak Pajak Parkir pada pendapatan asli daerah**

Didefinisikan parkir apabila keadaan atau keadaan diamnya suatu kendaraan yang tidak tetap atau sementara (Wahyudi, 2021). Menurut Hidayanti dan Mulia, 2019 Pajak parkir dikenakan pada bisnis yang sudah disediakan tempat parkir di luar jalan raya dan menyediakan layanan seperti penyimpanan kendaraan. Biaya parkir ini berlaku untuk atau dikenakan pada individu dan badan usaha (Wahyudi, 2021). Pendapatan dari pajak parkir meningkat setiap tahun karena semakin banyak wajib pajak baru menyediakan tempat parkir (Prasasti et al., 2022).

### **I.2.2 Dampak Pajak Penerangan Jalan pada pendapatan asli daerah**

Suatu iuran atas konsumsi listrik baik milik sendiri maupun milik orang lain dikenakan untuk penerangan jalan (Prasasti et al., 2022). Menurut (Dewi Sartika & Suci Ramadhani, 2020) menyatakan bahwa itu dianggap membayar pajak penerangan jalan ketika listrik dipakai untuk lampu umum dengan perkiraannya dibiayai atas pejabat daerah, sehingga pendapatan pajak lampu jalan perlu dipakai agar membayar lampu jalan di trotoar dan jalan besar, termasuk perawatan dan pencahayaan jalan. Karena semakin banyak orang yang menggunakan listrik, semakin banyak pelanggan, semakin banyak daya yang tersedia, dan semakin banyak orang yang memasang lampu jalan baru, maka akan semakin tinggi pajak penerangan jalan dan semakin banyak uang yang diterima pemerintah daerah (Rachman et al., 2021).

### **I.2.3 Dampak Pajak Hotel pada pendapatan asli daerah**

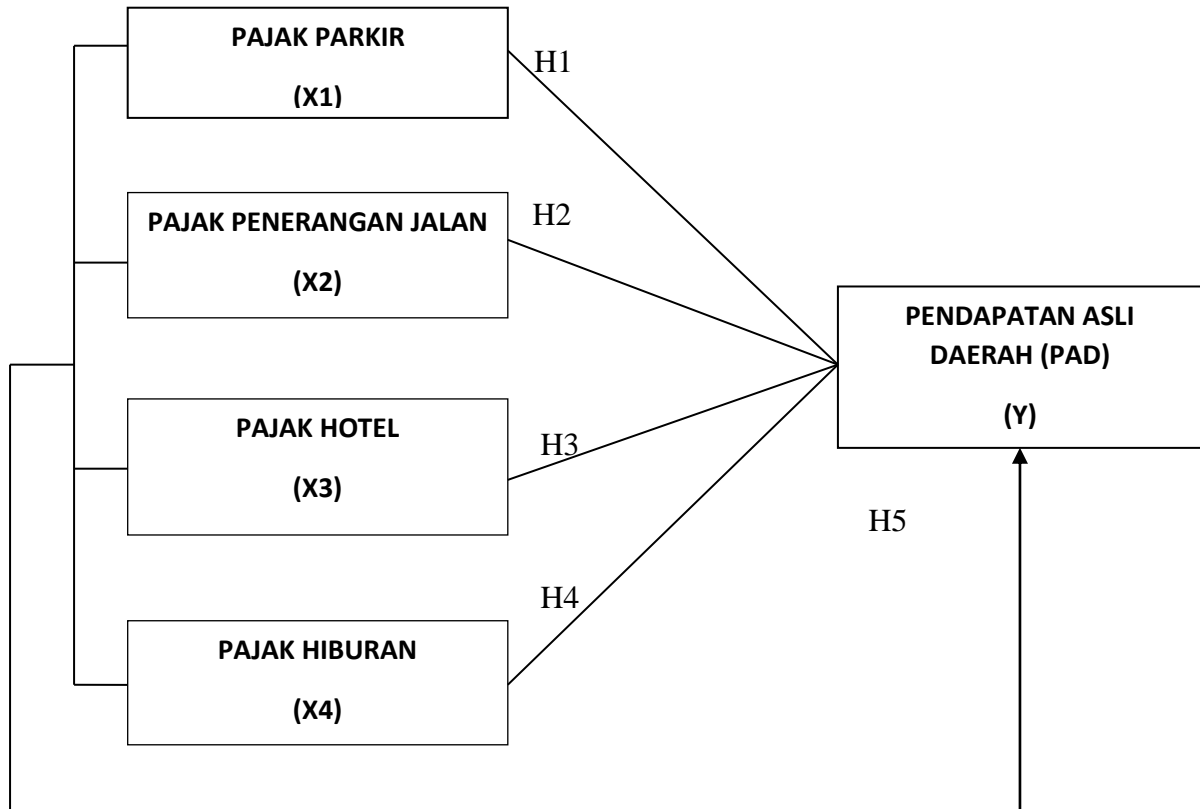
(Mutiarahajarani et al., 2013), dikemukakan iuran penginapan merupakan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan penginapan berbayar mencakup fasilitas seperti tempat olahraga dan hiburan serta layanan tambahan yang meningkatkan kenyamanan dan kemudahan. Pertempuran kabupaten/kota yang meningkat akan menarik pengunjung, termasuk turis, pebisnis, dan pemerintah, sebagai pusat perdagangan dan jasa. Tentunya para pengunjung ini akan membutuhkan penginapan berupa hotel untuk mengejar kepentingannya, yang akan berakibat pada peningkatan penerimaan pajak hotel yang tak terelakkan (Salsabilla, 2018). Karena pajak hotel memiliki kemampuan mendorong pendapatan, maka akan sangat berdampak pada pendapatan daerah. Sehingga, semakin banyaknya pembangunan hotel mendorong para wisatawan untuk mampir atau menginap di hotel tersebut (Lisa, 2020).

### **I.2.4 Dampak Pajak Hiburan pada pendapatan asli daerah**

(Saparuddin, 2017), pungutan wajib yang dikenal sebagai tariff hiburan dikenakan pada entitas yang menyelenggarakan hiburan publik dan mengumpulkan pembayaran dalam bentuk tiket atau karcis. Karena banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan agar dapat dilihat oleh masyarakat umum, diyakini bahwa pajak hiburan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Ini merupakan potensi karena penetapan kebijakan yang barutentang penetapan pemungutan pajak hiburan (Lewasari, 2019). Penerimaan pemerintah daerah dari pajak hiburan berbanding terbalik dengan besarnya pendapatan asli daerah (Damayanti, 2020).

### I.3 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah :



### I.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis berikut dibuat oleh peneliti berdasarkan pemikiran teoritis yang disebutkan di atas:

H<sub>1</sub> : Penerimaan Pajak Parkir berpengaruh pada suatu penghasilan asli daerah.

H<sub>2</sub> : Penghasilan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh pada suatu penghasilan asli daerah.

H<sub>3</sub>: Penghasilan Pajak Hotel berpengaruh pada suatu penghasilan asli daerah.

H<sub>4</sub> : Penghasilan Pajak Hiburan berpengaruh pada suatu penghasilan asli daerah.

H<sub>5</sub>: Penerimaan Pajak parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan berdampak pada suatu penghasilan asli daerah kota Medan